RENJA
TAHUN 2026

SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN TOBA

SALINAN

BUPATI TOBA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TOBA
NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Bappeda menyampaikan seluruh rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan Penetapan Renja Perangkat Daerah paling lambat 1(satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Tahun 2026;

Mengingat

1. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir Menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 76);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2017 Nomor 12);
16. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2024 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025 Nomor 3)

19. Peraturan Bupati Toba Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Toba.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Toba.
3. Bupati adalah Bupati Toba.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
6. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
7. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan, melalui urusan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat daerah adalah Dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1(satu) tahun.
9. Kebijakan adalah arah/ tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
10. Program adalah penjabaran kegiatan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB II
RUANG LINGKUP RENJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
(2) Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1(satu) tahun, yaitu Tahun 2026 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

BAB III
SISTEMATIKA PERANGKAT DAERAH
Pasal 3

(1) Sistematika Renja Perangkat Daerah adalah:
Bab I Pendahuluan;
Bab II Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
Bab V Penutup.
(2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 4

Penyusunan Renja Perangkat Daerah ini dimaksudkan untuk melaksanakan dokumen perencanaan perangkat daerah periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

Pasal 5

Tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah:

a. mendeskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh perangkat daerah; dan
b. program-program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program-program prioritas.

BAB V
TAHAPAN PENYUSUNAN RENJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 6

Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

1. Persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah yang meliputi:
   a. penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Renja Perangkat Daerah;
   b. orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;
   c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
   d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah yang mencakup:
   a. analis gambaran pelayanan perangkat daerah;
   b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.
3. Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah yang meliputi:
   a. pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
   b. verifikasi oleh Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
4. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang meliputi penajaman program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

BAB VI
PENETAPAN RENJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 7

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah Kabupaten;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Inspektorat Daerah;
4. Dinas-Dinas:
   a. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
   b. Dinas Komunikasi dan Informatika;
   c. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
   d. Dinas Sosial;
   e. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
   f. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
   g. Dinas Lingkungan Hidup;
   h. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
   i. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
   j. Dinas Kesehatan;
   k. Dinas Pertanian;
   l. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
   m. Dinas Perhubungan;
   n. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
   o. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan;
   p. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak;
   q. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
   r. Satuan Polisi Pamong Praja.

5. Badan-Badan:
   a. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
   b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
   c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
   d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
   e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
   f. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

6. Kecamatan:
   a. Kecamatan Tampahan;
   b. Kecamatan Balige;
   c. Kecamatan Laguboti;
   d. Kecamatan Sigumpar;
   e. Kecamatan Silaen;
   f. Kecamatan Siantar Narumonda;
   g. Kecamatan Porsea;
   h. Kecamatan Uluan;
   i. Kecamatan Bonatua Lunasi;
   j. Kecamatan Parmaksian;
   k. Kecamatan Pintu Pohan Meranti;
   l. Kecamatan Lumban Julu;
   m. Kecamatan Ajibata;
   n. Kecamatan Habinsaran;
   o. Kecamatan Borbor;
   p. Kecamatan Nassau;

BAB VII
PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toba

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 13 Agustus 2025
BUPATI TOBA,

Cap/ dto

EFFENDI SINTONG P. NAPITUPULU

Diundangkan di Balige
pada tanggal 13 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA,

Cap/dto

AUGUS SITORUS
BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2025 NOMOR 27

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. TOBA
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b. Kepala Bagian Hukum

LUKMAN JANTI SIAGIAN, SH, MH
NIP. 19750804 200502 1 002

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karuniaNya, sehingga dapat disusun Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Toba Tahun 2026.

Renja Sekretariat DPRD merupakan dokumen Perangkat Daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional yang diaplikasikan ke dalam Peraturam Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renja Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan sasaran yang disertai dengan indikator kinerja dan pendanaan sesuai tugas dan fungsi PD yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Tersusunnya renja ini disamping sebagai dokumen perencanaan, juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan sehingga terdapat arah yang jelas dari program/kegiatan Sekretariat DRPD Kabupaten Toba.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Toba Tahun 2026, semoga bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan.

BALIGE, 2025

Plt. SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TOBA

DONALD SIMANJUNTAK, S.H.
PEMBINA TK. I
NIP. 19701125 200604 1 002

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 3

1.3 Maksud dan Tujuan 5

1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN 7

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Toba 7

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD 11

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD 13

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 15

2.5 Penelaahan usulan Program & Kegiatan Masyarakat 16

BAB III TUJUAN DAN SASARAN 17

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 17

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat DPRD..... 17

3.3 Program dan Kegiatan 20

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 23

BAB V PENUTUP 24

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Sekretariat DPRD Kabupaten Toba ini merupakan suatu tahapan operasionalisasi dari Rencana Strategis Periode 2025-2029 Sekretariat Daerah Kabupaten Toba yang sedang dirancang. Dengan disusunnya Rencana Kerja Tahun 2026 ini diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi seluruh aparatur di Sekretariat DPRD Kabupaten Toba dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga target kinerja yang telah direncanakan sebelumnya dalam Rencana Strategis dapat tercapai dengan baik. Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Toba ini diharapkan dapat terpantau dan terevaluasi sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran dari tahun ke tahun sebagaimana tercantum dalam Rancangan Rencana Strategis. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kabupaten Toba Tahun 2026 merupakan Dokumen Perencanaan PD untuk Periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) dan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Toba yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pada Tahun 2026, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sekretariat DPRD Kabupaten Toba menyusun Rancangan Awal Renja PD Tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada Rancangan RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2025-2029. Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa sistem perencanaa pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah berdasarkan Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, keterpaduan pola perencanaan pembangunan daerah menjadi poin yang penting dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governace) yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, partisipatif, transparan dan akuntabel. Dengan berlakunya undang-undang ini maka terjadi perubahan pola perencanaan pembangunan daerah, dari sistem top-down (dari atas ke bawah) sekaran bottom-up (dari bawah ke atas). Artinya di era otonomi daerah ini maka kepentingan masyarakatlah yang menjadi prioritaas utama.

Dalam penyusunan Renja PD disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi dari setiap PD. Proses perencanaan tahunan PD diawali dengan menyusun rancangan rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, serta mempertimbangkan kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga lainnya. Hal ini dimaksudkan agar sasaran dan tujuan serta alokasi anggaran/lembaga lainnya. Hal ini dimaksudkan agar sasaran dan tujuan serta alokasi anggaran/kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah dapat bersinergi dalam pencapaiannya.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD). Berkaitan dengan itu, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan pedoman dalam penyusunan kebijakan anggaran prioritas dan Plafon Anggaran sementara dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2026.

Dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Toba menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 sesuai dengan tugas tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Toba dalam mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD. Rancangan Awal

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 dalam penyusunannya mengacu pada Renstra Perangkat Daerah yang memuat rumusan rencana program dan kegiatan PD Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 yang kemudian dikoordinasikan dalam upaya penyusunan Rancangan RKPD. Rancangan RKPD yang telah disahkan menjadi RKPD merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah melalui TAPD untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran sementara sebagai tahap dalam penyusunan RAPBD dan juga sebagai pedoman bagi PD untuk menyusun RKAPD dan selanjuntya menjadi acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah. Di dalamnya juga memuat sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan, program-program pembangunan dan kegiatan pokok pembangunan dalam 1 (satu) tahun, sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program RKPD Kabupaten Toba dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Toba Tahun 2025-2029.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Toba adalah :

1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3794);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6474);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Toba Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Toba
10. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

11. Peraturan Bupati Toba Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Tahun 2026;
12. Peraturan Bupati Toba Nomor 27 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Tahun 2026.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan disusunnya Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Toba adalah untuk memberikan arah dan pedoman perencanaan Program dan Kegiatan tahunan Sekretariat DPRD Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan prioritas agar terarah dan terpadu sesuai dengan tugas dan fungsi serta isu permasalahan penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi untuk mendukung pelaksanaaan tugas dan fungsi DPRD Sekretariat DPRD serta untuk mewujudkan Visi Misi Kepala Daerah terpilih : TOBA MANTAP 2029 "Maju Daerahnya, Sejahtera Rakyatnya, dan Berkelanjutan Pembangunannya" yang diwujudkan melalui Program dan Kegiatan PD yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Toba Tahun 2025-2029.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Toba ini adalah sebagai berikut :

BAB. I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB. II : HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun lalu dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD
2.4. Review terhadap Rancangan awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN & SASARAN SEKRETARIAT DPRD
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat DPRD
3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD

BAB V : PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TOBA

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan adalah menginterpretasikan sejauh mana kemampuan Sekretariat DPRD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Sekretariat DPRD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Tahun 2024 Sekretariat DPRD Kabupaten Toba telah melaksanakan berbagai program/kegiatan yang menjadi kewenangannya dalam satu bidang urusan wajib yaitu urusan wajib pemerintah fungsi penunjang administrasi.

Hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Sekretariat DPRD Kabupaten Toba Tahun 2024 secara umum telah dilaksanakan dengan optimal dalam mencapai target yang ditetapkan. Hal ini ditunjukkan persentase terlaksananya kegiatan dan dapat memenuhi output yang diharapkan. Di tahun 2024 dilaksanakan 2 (dua) program dengan 13 kegiatan. Sekretariat DPRD Kabupaten Toba mengelola anggaran sebesar Rp. 51.631.053.351 *(Lima Puluh Satu Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Satu Juta Lima Puluh Tiga RIbu Tiga Ratus Lima Puluh Satu Rupiah)* dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 48.821.863.289 *(Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah).*

Adapun kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2024, diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
  - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
  - Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
  - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
  - Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
- Layanan Administrasi DPRD
  - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD

b. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

- Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
  - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
- Peningkatan Kapasitas DPRD
  - Pendalaman Tugas DPRD
  - Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
- Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
  - Pelaksanaan Reses
- Fasilitasi Tugas DPRD
  - Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
  - Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) dan pencapaian Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Toba sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.1 seperti berikut :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD dan Pencapaian RPJMD s/d Tahun 2024

Kabupaten Toba

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcomes*), Kegiatan (*Output*), Sub Kegiatan (*Output*)	Satuan Indikator	Target Capaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan (Renstra) Perangkat Daerah pada Akhir Periode		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan, Sub Kegiatan sampai dengan Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinejra Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024						Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024			
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1				2	3	4	5		6		7		8		9 = (8/7)		10 = (6+8)		11 = (10/5)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
D.URUSAN PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																				
II.Sekretariat DPRD																				
21. Sekretariat DPRD																				
4	02	02		**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Cakupan Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah**	Persen	**100.00**	**77,289,719,940.00**	**73.33**	**59,770,699,111.00**	**100.00**	**15,531,000,000.00**	**60.00**	**75,377,256,048.00**	**60.00%**	**485.33%**	**60.00**	**135,147,955,159.00**	**60.00%**	**174.86%**
4	02	02	2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Rancangan Perda	Dokumen	50.00	4,995,000,000.00	16.00	2,887,692,388.00	10.00	985,000,000.00	26.00	1,386,074,216.00	260.00%	140.72%	42.00	4,273,766,604.00	84.00%	85.56%
4	02	02	2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah pengawasan yang dilakukan	Dokumen	18.00	10,960,000,000.00	0.00	0.00	4.00	2,130,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
4	02	02	2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD	Persen	100	4,113,000,000.00	66.67	1,874,495,065.00	100.00	820,000,000.00	75.00	761,706,055.00	75.00%	92.89%	75.00	2,636,201,120.00	75.00%	64.09%
4	02	02	2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Aspirasi Masyarakat	Persen	100.00	3,631,852,380.00	100.00	577,729,876.00	100.00	720,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	577,729,876.00	0.00%	15.91%
4	02	02	2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Terintegrasinya Tugas dan Fungsi DPRD	Persen	100.00	53,589,867,560.00	100.00	54,430,781,782.00	100.00	10,876,000,000.00	175.00	73,229,475,777.00	175.00%	673.31%	175.00	127,660,257,559.00	175.00%	238.22%
4	02	01		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah**	**Persen**	**100.00**	**123,183,827,759.00**	**66.37**	**83,799,050,424.00**	**100.00**	**24,418,276,326.00**	**72.14**	**40,888,077,547.00**	**72.14%**	**167.45%**	**72.14**	**124,687,127,971.00**	**72.14%**	**101.22%**
4	02	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persen	75.00	203,000,000.00	0.00	0.00	100.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
4	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan	Orang	27.00	13,700,000,000.00	57.00	10,177,625,993.00	29.00	2,700,000,000.00	30.00	5,878,958,738.00	103.45%	217.74%	87.00	16,056,584,731.00	322.22%	117.20%
4	02	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Sarana dan Prasarana	Unit	8.00	710,000,000.00	0.00	0.00	8.00	135,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
4	02	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	Orang	27.00	1,405,000,000.00	47.00	364,745,769.00	29.00	300,000,000.00	41.00	421,011,616.00	141.38%	140.34%	88.00	785,757,385.00	325.93%	55.93%
4	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum	Persen	100.00	17,585,000,000.00	83.33	9,468,788,952.00	100.00	2,781,000,000.00	80.00	3,488,564,248.00	80.00%	125.44%	80.00	12,957,353,200.00	80.00%	73.68%
4	02	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Peralatan dan Perlengkapan Pendukung Kinerja Aparatur	Persen	100.00	3,633,000,000.00	100.00	1,504,377,717.00	100.00	375,000,000.00	33.33	8,261,700.00	33.33%	2.20%	33.33	1,512,639,417.00	33.33%	41.64%
4	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Kinerja Aparatur	Persen	100.00	8,905,126,400.00	100.00	5,310,358,965.00	100.00	1,815,000,000.00	100.00	2,851,338,346.00	100.00%	157.10%	100.00	8,161,697,311.00	100.00%	91.65%
4	02	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah yang Terpelihara	Persen	100.00	6,835,000,000.00	100.00	2,515,963,141.00	100.00	1,355,000,000.00	100.00	1,401,741,141.00	100.00%	103.45%	100.00	3,917,704,282.00	100.00%	57.32%

4	02	01	2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Cakupan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persen	100.00	63,905,300,000.00	77.78	49,092,868,305.00	100.00	12,943,000,000.00	66.67	23,885,801,795.00	66.67%	184.55%	66.67	72,978,670,100.00	66.67%	114.20%
4	02	01	2.16	Layanan Administrasi DPRD	Kebutuhan Pokok Pimpinan DPRD	Orang	3.00	6,302,401,359.00	15.00	5,364,321,582.00	3.00	1,234,276,326.00	3.00	2,952,399,963.00	100.00%	239.20%	100.00	8,316,721,545.00	3333.33%	131.96%
JUMLAH							**100.00**	**200,473,547,699.00**		**143,569,749,535.00**		**39,949,276,326.00**		**116,265,333,595.00**				**259,835,083,130.00**	**66.07%**	**138.04%**

EVALUASI TERHADAP HASIL PELAKSANAAN RKPD
TAHUN 2024
KABUPATEN TOBA

No.	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) Kegiatan (*output*) Sub Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode		Satuan indikator	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6	7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14=7+13		15=14/5X100%		16
				K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
D	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																								
II	Sekretariat DPRD																								
	21 Sekretariat DPRD																								
	Meningkatnya Kapasitas Lembaga DPRD																								
	I.	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Cakupan Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	100	77,289,719,940	Persen	73.33	59,770,699,111	100	15,531,000,000	10	5,013,547,915	21	12,700,867,789	14.44	26,054,544,295	14.44	31,608,296,049	60	75,377,256,048	60.00	135,147,955,159	0.60	1.75	
	1.	*Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD*	*Jumlah Rancangan Perda*	*50*	*4,995,000,000*	*Dokumen*	*16.00*	*2,887,692,388*	*10*	*985,000,000*	*5*	*36,716,600*	*5*	*170,609,100*	*8.00*	*208,583,300*	*8.00*	*970,165,216*	*26*	*1,386,074,216*	*42.00*	*4,273,766,604*	*0.84*	*0.86*	
		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	30	4,540,000,000	Dokumen	13.00	2,887,692,388	2	900,000,000	1	36,716,600	1	170,609,100	0.00	208,583,300	0.00	970,165,216	2	1,386,074,216	15.00	4,273,766,604	0.50	0.94	Setwan
		Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	20	455,000,000	Dokumen	0.00	0	1	85,000,000	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	Setwan
	2.	*Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan*	*Jumlah pengawasan yang dilakukan*	*18*	*10,960,000,000*	*Dokumen*	*0.00*	*0*	*4*	*2,130,000,000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0.00*	*0*	*0.00*	*0*	*0*	*0*	*0.00*	*0*	*0.00*	*0.00*	
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	18	10,960,000,000	Laporan	0.00	0	4	2,130,000,000	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	Setwan
	3.	*Peningkatan Kapasitas DPRD*	*Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD*	*100*	*4,113,000,000*	*Persen*	*66.67*	*1,874,495,065*	*100*	*820,000,000*	*0*	*0*	*31*	*80,054,000*	*22.22*	*156,304,000*	*22.22*	*525,348,055*	*75*	*761,706,055*	*75.00*	*2,636,201,120*	*0.75*	*0.64*	
		Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	30	3,600,000,000	Dokumen	33.00	1,869,095,065	12	720,000,000	0	0	5	67,904,000	5.00	137,404,000	5.00	500,448,055	15	705,756,055	48.00	2,574,851,120	1.60	0.72	Setwan
		Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	1	375,000,000	Orang	0.00	0	2	75,000,000	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	Setwan
		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	500	138,000,000	Dokumen	1.00	5,400,000	1	25,000,000	0	0	1	12,150,000	1.00	18,900,000	1.00	24,900,000	1	55,950,000	2.00	61,350,000	0.00	0.44	Setwan
	4.	*Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat*	*Aspirasi Masyarakat*	*100*	*3,631,852,380*	*Persen*	*100.00*	*577,729,876*	*100*	*720,000,000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0.00*	*0*	*0.00*	*0*	*0*	*0*	*0.00*	*577,729,876*	*0.00*	*0.16*	

No.	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) Kegiatan (*output*) Sub Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode		Satuan indikator	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6	7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14=7+13		15=14/5X100%		16
				K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	100	3,631,852,380	Dokumen	178.00	577,729,876	3	720,000,000	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	3	0	181.00	577,729,876	1.81	0.16	Setwan
	5.	***Fasilitasi Tugas DPRD***	***Terintegrasinya Tugas dan Fungsi DPRD***	***100***	***53,589,867,560***	***Persen***	***100.00***	***54,430,781,782***	***100***	***10,876,000,000***	***25***	***4,976,831,315***	***50***	***12,450,204,689***	***50.00***	***25,689,656,995***	***50.00***	***30,112,782,778***	***175***	***73,229,475,777***	***175.00***	***127,660,257,559***	***1.75***	***2.38***	
		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	3200	53,200,076,000	Dokumen	636.00	54,270,234,132	8	10,800,000,000	2	4,913,595,615	4	12,299,347,589	4.00	25,402,875,724	4.00	29,562,794,107	14	72,178,613,035	650.00	126,448,847,167	0.20	2.38	Setwan
		Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	75	389,791,560	Dokumen	25.00	160,547,650	16	76,000,000	4	63,235,700	8	150,857,100	8.00	286,781,271	8.00	549,988,671	28	1,050,862,742	53.00	1,211,410,392	0.71	3.11	Setwan
																						Rata-rata capaian kinerja (%)	**60.00%**	**174.86%**	
																						Predikat Kinerja	**Rendah**	**Sangat Tinggi**	
	II.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah**	**100**	**123,183,827,759**	**Persen**	**66.37**	**83,799,050,424**	**100**	**24,418,276,326**	**14**	**3,736,071,495**	**17**	**7,275,972,301**	**16.47**	**12,662,466,511**	**25.14**	**17,213,567,240**	**72**	**40,888,077,547**	**72.14**	**124,687,127,971**	**0.72**	**1.01**	
	6.	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah***	***75***	***203,000,000***	***Persen***	***0.00***	***0***	***100***	***40,000,000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0.00***	***0***	***0.00***	***0***	***0***	***0***	***0.00***	***0***	***0.00***	***0.00***	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	75	203,000,000	Dokumen	*0.00*	*0*	8	40,000,000	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	Setwan
	7.	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Cakupan Layanan Administrasi Keuangan***	***27***	***13,700,000,000***	***Orang***	***57.00***	***10,177,625,993***	***29***	***2,700,000,000***	***20***	***367,482,934***	***20***	***971,868,986***	***20.00***	***1,963,610,016***	***20.00***	***2,575,996,802***	***30***	***5,878,958,738***	***87.00***	***16,056,584,731***	***3.22***	***1.17***	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27	13,700,000,000	Orang/bulan	57.00	10,177,625,993	29	2,700,000,000	20	367,482,934	20	971,868,986	20.00	1,963,610,016	20.00	2,575,996,802	30	5,878,958,738	87.00	16,056,584,731	3.22	1.17	Setwan
	8.	***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	***Cakupan Pelayanan Penunjang Sarana dan Prasarana***	***8***	***710,000,000***	***Unit***	***0.00***	***0***	***8***	***135,000,000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0.00***	***0***	***0.00***	***0***	***0***	***0***	***0.00***	***0***	***0.00***	***0.00***	
		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	8	710,000,000	Laporan	0.00	0	8	135,000,000	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	Setwan
	9.	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek***	***27***	***1,405,000,000***	***Orang***	***47.00***	***364,745,769***	***29***	***300,000,000***	***5***	***39,124,132***	***12***	***104,792,746***	***12.00***	***127,507,196***	***12.00***	***149,587,542***	***41***	***421,011,616***	***88.00***	***785,757,385***	***3.26***	***0.56***	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	27	1,405,000,000	Orang	47.00	364,745,769	29	300,000,000	5	39,124,132	12	104,792,746	12.00	127,507,196	12.00	149,587,542	41	421,011,616	88.00	785,757,385	3.26	0.56	Setwan
	10.	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Cakupan Layanan Administrasi Umum***	***100***	***17,585,000,000***	***Persen***	***83.33***	***9,468,788,952***	***100***	***2,781,000,000***	***15***	***410,395,302***	***25***	***739,238,938***	***20.00***	***1,050,849,092***	***20.00***	***1,288,080,916***	***80***	***3,488,564,248***	***80.00***	***12,957,353,200***	***0.80***	***0.74***	

No.	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) Kegiatan (*output*) Sub Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode		Satuan indikator	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6	7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14=7+13		15=14/5X100%		16
				K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100	470,000,000	Paket	20.00	60,957,500	4	85,000,000	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	20.00	60,957,500	0.20	0.13	Setwan
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	650	1,235,000,000	Paket	134.00	688,354,937	4	240,000,000	1	16,968,889	1	106,937,521	1.00	119,246,403	1.00	256,965,477	4	500,118,290	138.00	1,188,473,227	0.21	0.96	Setwan
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	50	1,830,000,000	Paket	14.00	438,644,858	4	365,000,000	1	9,890,766	1	83,948,856	1.00	97,879,806	1.00	153,482,556	4	345,201,984	18.00	783,846,842	0.36	0.43	Setwan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	350	466,000,000	Dokumen	74.00	212,000,000	4	96,000,000	0	0	2	19,000,000	1.00	43,470,000	1.00	87,010,000	4	149,480,000	78.00	361,480,000	0.22	0.78	Setwan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3240	9,834,000,000	Laporan	3,248	6,782,656,953	8	1,995,000,000	2	383,535,647	2	529,352,561	2.00	790,252,883	2.00	790,622,883	8	2,493,763,974	3,256	9,276,420,927	1.00	0.94	Setwan
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12000	3,750,000,000	Paket	20,012	1,286,174,704	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	20,012	1,286,174,704	1.67	0.34	Setwan
	11.	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Cakupan Peralatan dan Perlengkapan Pendukung Kinerja Aparatur***	***100***	***3,633,000,000***	***Persen***	***100.00***	***1,504,377,717***	***100***	***375,000,000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0.00***	***0***	***33.33***	***8,261,700***	***33***	***8,261,700***	***33.33***	***1,512,639,417***	***0.33***	***0.42***	
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4	1,750,000,000	Unit	4.00	1,162,400,000	4	100,000,000	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	4.00	1,162,400,000	1.00	0.66	Setwan
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	40	1,093,000,000	Unit	18.00	87,660,613	10	115,000,000	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	18.00	87,660,613	0.45	0.08	Setwan
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	40	790,000,000	Unit	8.00	254,317,104	8	160,000,000	0	0	0	0	0.00	0	8.00	8,261,700	8	8,261,700	16.00	262,578,804	0.40	0.33	Setwan
	12.	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Jasa Penunjang Kinerja Aparatur***	***100***	***8,905,126,400***	***Persen***	***100.00***	***5,310,358,965***	***100***	***1,815,000,000***	***25***	***213,074,597***	***25***	***493,083,138***	***25.00***	***864,213,643***	***25.00***	***1,280,966,968***	***100***	***2,851,338,346***	***100.00***	***8,161,697,311***	***1.00***	***0.92***	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100	1,765,000,000	Laporan	32.00	1,050,531,765	12	345,000,000	3	35,124,597	3	57,883,138	3.00	103,113,643	3.00	138,416,968	12	334,538,346	44.00	1,385,070,111	0.44	0.78	Setwan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	57	7,140,126,400	Laporan	69.00	4,259,827,200	12	1,470,000,000	3	177,950,000	3	435,200,000	3.00	761,100,000	3.00	1,142,550,000	12	2,516,800,000	81.00	6,776,627,200	1.42	0.95	Setwan

No.	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) Kegiatan (*output*) Sub Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode		Satuan indikator	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6	7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14=7+13		15=14/5X100%		16
				K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	13.	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Barang Milik Daerah yang Terpelihara***	***100***	***6,835,000,000***	***Persen***	***100.00***	***2,515,963,141***	***100***	***1,355,000,000***	***20***	***112,085,217***	***20***	***237,576,519***	***20.00***	***383,379,885***	***40.00***	***668,699,520***	***100***	***1,401,741,141***	***100.00***	***3,917,704,282***	***1.00***	***0.57***	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17	3,720,000,000	Unit	37.00	2,267,551,271	20	740,000,000	20	103,062,617	20	200,067,313	20.00	336,948,321	20.00	534,747,621	20	1,174,825,872	57.00	3,442,377,143	3.35	0.93	Setwan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17	346,000,000	Unit	37.00	67,643,241	20	70,000,000	20	3,851,075	20	6,070,431	20.00	12,420,289	20.00	12,581,049	20	34,922,844	57.00	102,566,085	3.35	0.30	Setwan
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	350,000,000	Unit	40.00	43,082,029	10	44,000,000	10	850,000	10	4,580,000	10.00	4,458,000	10.00	17,363,400	10	27,251,400	50.00	70,333,429	5.00	0.20	Setwan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	2,221,000,000	Unit	20.00	133,468,600	4	461,000,000	4	4,321,525	4	26,858,775	4.00	29,553,275	4.00	91,342,450	4	152,076,025	24.00	285,544,625	6.00	0.13	Setwan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	198,000,000	Unit	4.00	4,218,000	4	40,000,000	0	0	0	0	0.00	0	4.00	12,665,000	4	12,665,000	8.00	16,883,000	2.00	0.09	Setwan
	14.	***Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD***	***Cakupan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD***	***100***	***63,905,300,000***	***Persen***	***77.78***	***49,092,868,305***	***100***	***12,943,000,000***	***8***	***2,371,366,695***	***8***	***4,100,807,875***	***8.33***	***7,399,455,785***	***41.67***	***10,014,171,440***	***67***	***23,885,801,795***	***66.67***	***72,978,670,100***	***0.67***	***1.14***	
		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	30	59,614,000,000	Orang/Bulan	150.00	48,611,914,305	30	12,088,000,000	30	2,371,366,695	30	4,100,807,875	30.00	7,399,455,785	30.00	9,999,486,440	30	23,871,116,795	180.00	72,483,031,100	6.00	1.22	Setwan
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	900	3,466,300,000	Paket	30.00	432,300,000	30	690,000,000	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	30.00	432,300,000	0.03	0.12	Setwan
		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	30	825,000,000	Orang	10.00	48,654,000	30	165,000,000	0	0	0	0	0.00	0	30.00	14,685,000	30	14,685,000	40.00	63,339,000	1.33	0.08	Setwan
	15.	***Layanan Administrasi DPRD***	***Kebutuhan Pokok Pimpinan DPRD***	***3***	***6,302,401,359***	***Orang***	***15.00***	***5,364,321,582***	***3***	***1,234,276,326***	***0***	***222,542,618***	***1***	***628,604,099***	***1.00***	***873,450,894***	***1.00***	***1,227,802,352***	***3***	***2,952,399,963***	***18.00***	***8,316,721,545***	***6.00***	***1.32***	
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	3	6,302,401,359	Paket	24.00	5,364,321,582	12	1,234,276,326	3	222,542,618	3	628,604,099	3.00	873,450,894	3.00	1,227,802,352	12	2,952,399,963	36.00	8,316,721,545	12.00	1.32	Setwan
																							Rata-rata capaian kinerja (%)	**72.14%**	**101.22%**	
																							Predikat Kinerja	**Sedang**	**Sangat Tinggi**	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM				**200,473,547,699**			**143,569,749,535**		**39,949,276,326**		**8,749,619,410**		**19,976,840,090**		**38,717,010,806**		**48,821,863,289**		**116,265,333,595**		**259,835,083,130**				
																							TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM	**66.07%**	**138.04%**	**Sekretariat DPRD**
																							PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	**Sedang**	**Sangat Tinggi**	

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, maka Sekretariat DPRD melaksanakan tugas administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Pelayanan yang diberikan adalah untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta memfasilitasi terwujudnya hubungan kerja yang harmonis antara DPRD dengan Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat DPRD berdasarkan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Toba Tahun 2025 – 2029 telah menetapkan tujuan dan sasaran perangkat daerah sebagai panduan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD.

Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Toba, ditetapkan Tujuan Sekretariat DPRD yaitu "Meningkatkan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD". Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkanlah tersebut, Sekretariat DPRD Kabupaten Toba telah menetapkan Sasaran Strategis, yaitu "Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD". Sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD mengarah pada satu tujuan yaitu meningkatnya pelayanan baik itu pelayanan administrasi, keuangan maupun pelayanan dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD.

Tabel 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TOBA

Sekretariat DPRD Kabupaten Toba

No	Indikator Kinerja Program	SPM/Standar Nasional	IKK		Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	Cakupan Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah			100 %	100 %	100 %	100 %	88,86%	100 %	100 %	100 %	
	Tingkat Penetapan Perda	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %	66,60%	100 %	100 %	100 %	

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DPRD

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan, kajian hasil evaluasi pelaksanaan, serta kajian terhadap pencapaian kinerja RENSTRA Sekretariat DPRD, maka dapat dirumusan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Toba. Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi dimaksud untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Sekretariat DPRD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja RENSTRA Sekretariat DPRD.

Sebelum merumuskan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, akan dijelaskan dahulu beberapa hal yang perlu dipertimbangkan yaitu sebagai berikut :

a. Beberapa permasalahan dalam peningkatan pelayanan Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut :
    1. Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi hasil rencana kerja (RENJA)
    2. Tingkat kemampuan SDM belum merata dalam penyusunan rencana kerja
    3. Masih kurangnya fasilitas kebijakan dan penyelenggaraan koordinasi, kerjasama antar bagian dan sub bagian
    4. Belum terpenuhinya hasil kinerja yang baik untuk menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan

b. Tantangan dalam meningkatkan pelayanan Seketariat DPRD adalah sebagai berikut :

1. Tantangan Sekretariat DPRD Kabupate Toba untuk meningkakan kinerja tugas dan fungsi DPRD :
   a. Memberikan bantuan teknis, adminisrasi dan ketatausahaan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Toba;
   b. Mempersiapkan rencana kerja satu tahun, lima tahun dan menyusun jadwal dan agenda kerja DPRD serta menyusun rencana kerja anggaran sesuai dengan kebutuhan setiap tahunnya;
   c. Meningkatkan sistem informasi pelayanan kelembagaan DPRD;
   d. Mempersiapkan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan kebutuhan DPRD;
   e. Memfasilitasi setiap kegiatan kelembagaan DPRD.

2. Isu-isu Strategis :
   a. Belum tersusunnya rencana krja dan agenda kerja masing-masing alat kelengkapan DPRD sehingga target yang ingin dicapai dari pelaksanaan kinerja tidak dapat diukur;
   b. Masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana representatif sesuai dengan standar kecukupan penunjang profesionalitas bekerja bagi kelembagaan.
   c. Kurangnya ketersediaan sumber daya yang berkualitas, disiplin dan berintegritas;

Beberapa isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Toba sebagai berikut :

a. Belum optimalnya koordinasi dan sinergi antara Sekretariat DPRD dengan DPRD dalam rangka pencapaian kinerja
b. Belum optimalnya kualitas perencanaan di seluruh bidang untuk mendukung pencapaian sasaran kinerja.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Toba telah berjalan baik sesuai dengan program yang direncanakan. Namun dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut masih ada perbaikan-perbaikan untuk memaksimalkan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Toba.

Adapun program kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Toba adalah :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
II. Program Dukungan Pelaksanaaan Tugas dan Fungsi DPRD

Untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini :

TABEL 2.4

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026

KABUPATEN TOBA

Sekretariat DPRD Kabupaten Toba

Lembar.....dari.....

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I.	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**				**22,249,835,161**	I. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**				**27,134,403,650.20**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				**45,000,000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**52,800,000**	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Toba	Input : Adanya Dana Out Put : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	35,000,000	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Toba	Input : Adanya Dana Out Put : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100 Persen	52,800,000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Toba	Input : Adanya Dana Out Put : Jlh Lap. Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD & Lap. Hasil Koord. Peny. Lap Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	10,000,000	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Toba	Input : Adanya Dana Out Put : Jlh Lap. Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD & Lap. Hasil Koord. Peny. Lap Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100 Persen	-	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				**3,320,526,000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**3,245,000,000**	
3.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Toba	Input : Adanya Dana Out Put : Jumlah orang yang menerima Gaji & Tunjangan ASN	35 Orang/Bulan	3,320,526,000	3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Toba	Input : Adanya Dana Out Put : Jumlah orang yang menerima Gaji & Tunjangan ASN	100 Persen	3,245,000,000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				**15,000,000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**390,500,000**	
4.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Toba	Input : Adanya Dana Out Put : Jumlah orang yang mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	15,000,000	4. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Toba	Input : Adanya Dana Out Put : Jumlah orang yang mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Persen	390,500,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				**1,895,166,003**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**3,287,900,000**	
5.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Toba	Input : Adanya Dana Out Put : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4 Paket	82,051,062	5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Toba	Input : Adanya Dana Out Put : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	100 Persen	148,500,000	
6.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Toba	Input : Adanya Dana Out Put : Jumlah Paket Peralatan & Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	183,776,575	6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Toba	Input : Adanya Dana Out Put : Jumlah Paket Peralatan & Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Persen	330,000,000	
7.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Toba	Input : Adanya Dana Out Put : Jumlah Paket Barang Cetakan & Penggandaan yang disediakan	4 Paket	175,671,430	7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Toba	Input : Adanya Dana Out Put : Jumlah Paket Barang Cetakan & Penggandaan yang disediakan	100 Persen	434,500,000	
8.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Toba	Input : Adanya Dana Out Put : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	4 Dokumen	98,100,000	8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Toba	Input : Adanya Dana Out Put : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	100 Persen	110,000,000	
9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Toba	Input : Adanya Dana Out Put : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1,355,566,936	9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Toba	Input : Adanya Dana Out Put : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Persen	2,264,900,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				**390,404,399**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**467,500,000**	
10.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Toba	Input : Adanya Dana Out Put : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	20,000,000	10. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Toba	Input : Adanya Dana Out Put : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	100 Persen	110,000,000	
11.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Luar Kab. Toba	Input : Adanya Dana Out Put : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	145,192,340	11. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Luar Kab Toba	Input : Adanya Dana Out Put : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100 Persen	137,500,000	
12.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Toba	Input : Adanya Dana Out Put : Jumlah Unit Sarana & Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	225,212,059	12. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Toba	Input : Adanya Dana Out Put : Jumlah Unit Sarana & Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100 Persen	220,000,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**1,332,318,944**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**2,134,000,000**	
13.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Toba	Input : Adanya Dana Out Put : Jumlah Laporan Peny. Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	300,000,000	13. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Toba	Input : Adanya Dana Out Put : Jumlah Laporan Peny. Jasa Komunikasi, Sumber : Daya Air dan Listrik yang disediakan	100 Persen	429,000,000	
14.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Toba	Input : Adanya Dana Out Put : Jumlah Laporan Peny. Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,032,318,944	14. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Toba	Input : Adanya Dana Out Put : Jumlah Laporan Peny. Jasa Pelayanan Umum kantor yang Disediakan	100 Persen	1,705,000,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**1,009,623,000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**1,633,500,000**	
15.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Toba	Input : Adanya Dana Out Put : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	16 Unit	865,000,000	15. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Toba	Input : Adanya Dana Out Put : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	100 Persen	880,000,000	

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
16.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Toba	Input : Adanya Dana Out Put : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	36,000,000	16. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Toba	Input : Adanya Dana Out Put : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100 Persen	82,500,000	
17.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Toba	Input : Adanya Dana Out Put : Jumlah Peralatan & Mesin Lainnya yg Dipelihara	4 Unit	65,701,455	17. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Toba	Input : Adanya Dana Out Put : Jumlah Peralatan & Mesin Lainnya yg Dipelihara	100 Persen	82,500,000	
18.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Toba	Input : Adanya Dana Out Put : Jumlah Gedung Kantor & Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	23,693,657	18. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Toba	Input : Adanya Dana Out Put : Jumlah Gedung Kantor & Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 Persen	539,000,000	
19.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Toba	Input : Adanya Dana Out Put : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5 Unit	19,227,888	19. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Toba	Input : Adanya Dana Out Put : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	100 Persen	49,500,000	
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				**12,772,210,000**	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**				**14,393,500,000**	
20.	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Kab. Toba	Input : Adanya Dana Out Put : Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	30 Orang/Bln	11,955,710,000	20. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Kab. Toba	Input : Adanya Dana Out Put : Jumlah Anggota DPRD yang menerima Hak Keuangan DPRD	100 Persen	13,420,000,000	
21.	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Kab. Toba	Input : Adanya Dana Out Put : Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	30 Paket	650,000,000	21. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Kab. Toba	Input : Adanya Dana Out Put : Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	100 Persen	792,000,000	
22.	Pelaksanaan Medical Check-Up DPRD	Kab. Toba	Input : Adanya Dana Out Put : Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	30 Orang	166,500,000	22. Pelaksanaan Medical Check-Up DPRD	Kab. Toba	Input : Adanya Dana Out Put : Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	100 Persen	181,500,000	
	Layanan Administrasi DPRD				**1,469,586,815**	**Layanan Administrasi DPRD**				**1,529,703,650**	
23.	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Kab. Toba	Input : Adanya Dana Out Put : Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	12 Paket	1,469,586,815	23. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Kab. Toba	Input : Adanya Dana Out Put : Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	100 Persen	1,529,703,650.20	
II.	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**				**13,060,523,839**	**II. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**				**17,846,400,000**	
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD				**1,023,005,500**	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**				**1,160,500,000**	
1.	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Kab. Toba	Input : Adanya Dana Out Put : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	2 Dokumen	863,915,500	1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Kab. Toba	Input : Adanya Dana Out Put : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	100 Persen	1,034,000,000	
2.	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Kab. Toba	Input : Adanya Dana Out Put : Jumlah Dokumen Hasil Peny. Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah yang Difasilitasi	1 Dokumen	159,090,000	2. Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Kab. Toba	Input : Adanya Dana Out Put : Jumlah Dokumen Hasil Peny. Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah yang Difasilitasi	100 Persen	126,500,000	
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan				**765,080,000**	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**				**2,640,000,000**	
3.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Kab. Toba	Input : Adanya Dana Out Put : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bid. Pemerintahan & Hukum	4 Laporan	765,080,000	3. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Kab. Toba	Input : Adanya Dana Out Put : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bid. Pemerintahan & Hukum	100 Persen	2,640,000,000	
	Peningkatan Kapasitas DPRD				**1,149,820,000**	**Peningkatan Kapasitas DPRD**				**918,500,000**	
4.	Pendalaman Tugas DPRD	Kab. Toba	Input : Adanya Dana Out Put : Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	12 Dokumen	1,014,700,000	4. Pendalaman Tugas DPRD	Kab. Toba	Input : Adanya Dana Out Put : Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	100 Persen	792,000,000	
5.	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Kab. Toba	Input : Adanya Dana Out Put : Jumlah Orang Dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	1 Orang	75,000,000	5. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Kab. Toba	Input : Adanya Dana Out Put : Jumlah Orang Dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	100 Persen	82,500,000	
6.	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Kab. Toba	Input : Adanya Dana Out Put : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1 Dokumen	60,120,000	6. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Kab. Toba	Input : Adanya Dana Out Put : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	100 Persen	44,000,000	
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat				**1,049,995,344**	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**				**858,000,000**	
7.	Pelaksanaan Reses	Kab. Toba	Input : Adanya Dana Out Put : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	1,049,995,344	7. Pelaksanaan Reses	Kab. Toba	Input : Adanya Dana Out Put : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	100 Persen	858,000,000	
	Fasilitasi Tugas DPRD				**9,072,622,995**	**Fasilitasi Tugas DPRD**				**12,269,400,000**	
8.	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kab. Toba	Input : Adanya Dana Out Put : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Dokumen	8,535,105,245	8. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kab. Toba	Input : Adanya Dana Out Put : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	100 Persen	12,177,000,000	
9.	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Kab. Toba	Input : Adanya Dana Out Put : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	15 Dokumen	537,517,750	9. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Kab. Toba	Input : Adanya Dana Out Put : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	100 Persen	92,400,000	
	TOTAL KESELURUHAN				**35,310,359,000**	**TOTAL KESELURUHAN**				**44,980,803,650.20**	

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

TABEL 2.5

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2026 KABUPATEN TOBA

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	-

BAB III

TUJUAN & SASARAN SEKRETARIAT DPRD

Rencana kerja adalah merupakan proses sistematis dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis menggambarkan Visi, Misi, Tujuan Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya, selanjutnya di uraikan di bawah ini.

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja dan penentuan jumlah anggaran yang dipergunakan di Sekretariat DPRD Kabupaten Toba bukanlah berasal dari Kebijakan Nasional melainkan murni dari Kebijakan APBD Kabupaten Toba sendiri dengan kata lain DAK dari Pusat atau Nasional tidak ada diterima.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat DPRD

Tujuan adalah pernyataan hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang dihadapi. Dengan demikian tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang diharapkan dapat menggabarkan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan akan menggambarkan kondisi yang ingin dicapai di masa depan dengan lebih mengoperasionalkan pelaksanaan misi. Tujuan juga mencerminkan adanya prioritas program. Kegiatan dan sub kegiatan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Melalui perumusan tujuan diharapkan dapat menunjuk suatu kondisi yang ingin dicapai ke depan atau mengarahkan

perumusan sasaran tahunan, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan. Tujuan Sekretariat DPRD Kabupaten Toba konsisten dengan tugas pokok dan fungsinya secara kolektif menggambarkan arah strategisnya dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu yujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, bisa dicapai, rasional untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan demikian sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu suatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan strategis. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi.

Sasaran Sekretariat DPRD merupakan gambaran yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu maksimal 1 (satu) tahun atau kurang dari 1 (satu) tahun guna mencapai tujuan yang telah dirumuskan untuk 5 (lima) tahun ke depan. Indikator kinerja diperlukan dalam pengukuran atau penilaian keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran. Penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator kinerja melalui sistem pengolahan dan pengumpulan data/informasi untuk menentukan kinerja kegiatan, program dan kebijakan. Penetapan indikator kinerja harus didasarkan kepada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Penetapan indikator kinerja tersebut didasarkan pada kelompok menurut masukan (input), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator kinerja masukan dan

keluaran dapat dinilai sebelum kegiatan selesai, karena masukan adalah semua bahan termasuk orang, material, alat dan uang yang digunakan dalam proses untuk menghasilkan output. Sedangkan keluaran adalah suatu wujud atau keadaan yang diciptakan melalui proses yang mempunyai nilai tambah untuk dimanfaatkan.

Untuk indikator hasil, manfaat dan dampak akan diperoleh setelah kegiatan selsai, namun perlu diantisipasi sejak tahap perencanaan. Hasil adalah kegunaan langsung dari output atau manfaat suatu output ditinjau dari maksud atau sasaran output tersebut dihasilkan, manfaat adalah kegunaan lebih lanjut yang diharapkan dikaitkan dengan tujuan jangka menengah. Sedangkan dampak adalah kegunaan akhir dari output yang berkaitan dengan tujuan jangka panjang atau tujuan akhir.

Penetapan sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Toba untuk periode 2025-2029, beserta indikator capaiannya diharapkan dapat memberi fokus pada penyusunan kegiatan, sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Toba, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Toba merumuskan tujuan yang ingin dicapai ke depan yakni **"Meningkatkan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD"**.

Sasaran yang ingin dicapai oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Toba adalah **"Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD".**

Tabel 3.2

Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Tahun 2026

Misi 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Sebagai Pelayan (Parhobas) Rakyat		
TUJUAN	**SASARAN**	**INDIKATOR KINERJA**
Meningkatnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD
	Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD

3.3. Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Toba pada tahun 2026 yaitu sebagai berikut :

a. Mengarah pada pencapaian visi dan misi Bupati Toba sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Toba tahun 2025-2029
b. Mengarah pada penanganan permasalahan dan isu strategis dalam pelaksanaan pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Toba sebagaimana tertuang dalam RENSTRA tahun 2025-2029
c. Mengarah pada pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Toba.

Secara rinci program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu anggaran indikatif yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Toba pada tahun 2026 tertuang dalam tabel berikut ini (tabel rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah tahun 2026).

Untuk Program dan kegiatan akan diuraikan lebih rinci dalam kegiatan nyata dalam bentuk aktivitas pengarahan dan tenaga untuk mencapai visi dan misi. Adapun kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

TABEL 3.3

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TOBA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
4.02.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Penunjang Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Toba**		**22,249,835,161**				**27,134,403,650.20**
4.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**100%**	**45,000,000**				**52,800,000**
4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Toba	4 Dokumen	35,000,000	Dana Transfer Umum - DAU		100 Persen	52,800,000
4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD	Kab. Toba	2 Laporan	10,000,000	Dana Transfer Umum - DAU		100 Persen	-
4.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**3,320,526,000**				**3,245,000,000**
4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Toba	35 Orang/Bulan	3,320,526,000	Dana Transfer Umum - DAU		100 Persen	3,245,000,000
4.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**15,000,000**				**390,500,000**
4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Luar Kab. Toba	1 Orang	15,000,000	Dana Transfer Umum - DAU		100 Persen	390,500,000

4.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**1,895,166,003**				**3,287,900,000**
4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Toba	4 Paket	82,051,062	Dana Transfer Umum - DAU		100 Persen	148,500,000
4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Toba	4 Paket	183,776,575	Dana Transfer Umum - DAU		100 Persen	330,000,000
4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan	Kab. Toba	4 Paket	175,671,430	Dana Transfer Umum - DAU		100 Persen	434,500,000
4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan	Kab. Toba	4 Dokumen	98,100,000	Dana Transfer Umum - DAU		100 Persen	110,000,000
4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Toba & Luar Kab. Toba	12 Laporan	1,355,566,936	Dana Transfer Umum - DAU		100 Persen	2,264,900,000
4.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**390,404,399**				**467,500,000**
4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Disediakan	Kab. Toba	1 Unit	20,000,000	Dana Transfer Umum - DAU		100 Persen	110,000,000
4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	Kab. Toba	10 Unit	145,192,340	Dana Transfer Umum - DAU		100 Persen	137,500,000
4.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	Kab. Toba	5 Unit	225,212,059	Dana Transfer Umum - DAU		100 Persen	220,000,000
4.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**1,332,318,944**				**2,134,000,000**

4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	Kab. Toba	12 Laporan	300,000,000	Dana Transfer Umum - DAU		100 Persen	429,000,000
4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	Kab. Toba	12 Laporan	1,032,318,944	Dana Transfer Umum - DAU		100 Persen	1,705,000,000
4.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**1,009,623,000**				**1,633,500,000**
4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kab. Toba	16 Unit	865,000,000	Dana Transfer Umum - DAU		100 Persen	880,000,000
4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Toba	16 Unit	36,000,000	Dana Transfer Umum - DAU		100 Persen	82,500,000
4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	Kab. Toba	4 Unit	65,701,455	Dana Transfer Umum - DAU		100 Persen	82,500,000
4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Toba	5 Unit	23,693,657	Dana Transfer Umum - DAU		100 Persen	539,000,000
4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Toba	5 Unit	19,227,888	Dana Transfer Umum - DAU		100 Persen	49,500,000
4.02.01.2.15	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**				**12,772,210,000**				**14,393,500,000**
4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD Yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Kab. Toba	30 Orang/Bulan	11,955,710,000	Dana Transfer Umum - DAU		100 Persen	13,420,000,000
4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Yang Disediakan	Kab. Toba	30 Paket	650,000,000	Dana Transfer Umum - DAU		100 Persen	792,000,000

4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang Yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Luar Kab. Toba	30 Orang	166,500,000	Dana Transfer Umum - DAU		100 Persen	181,500,000
4.02.01.2.16	**Layanan Administrasi DPRD**				**1,469,586,815**				**1,529,703,650.20**
4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD Yang Disediakan	Kab. Toba	12 Paket	1,469,586,815	Dana Transfer Umum - DAU		100 Persen	1,529,703,650.20
4.02.02	**Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**	**Cakupan Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah**			**13,060,523,839**				**17,846,400,000**
4.02.02.2.01	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**				**1,023,005,500**				**1,160,500,000**
4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Kab. Toba & Luar Kab. Toba	2 Dokumen	863,915,500	Dana Transfer Umum - DAU		100 Persen	1,034,000,000
4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik Yang Difasilitasi	Kab. Toba	1 Dokumen	159,090,000	Dana Transfer Umum - DAU		100 Persen	126,500,000
4.02.02.2.03	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**				**765,080,000**				**2,640,000,000**
4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Kab. Toba & Luar Kab. Toba	4 Laporan	765,080,000	Dana Transfer Umum - DAU		100 Persen	2,640,000,000
4.02.02.2.04	**Peningkatan Kapasitas DPRD**				**1,149,820,000**				**918,500,000**
4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Kab. Toba & Luar Kab. Toba	12 Dokumen	1,014,700,000	Dana Transfer Umum - DAU		100 Persen	792,000,000
4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang Dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Kab. Toba	1 Orang	75,000,000	Dana Transfer Umum - DAU		100 Persen	82,500,000
4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Kab. Toba	1 Dokumen	60,120,000	Dana Transfer Umum - DAU		100 Persen	44,000,000

4.02.02.2.05	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**				**1,049,995,344**				**858,000,000**
4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Kab. Toba	3 Dokumen	1,049,995,344	Dana Transfer Umum - DAU		100 Persen	858,000,000
4.02.02.2.08	**Fasilitasi Tugas DPRD**				**9,072,622,995**				**12,269,400,000**
4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kab. Toba & Luar Kab. Toba	12 Dokumen	8,535,105,245	Dana Transfer Umum - DAU		100 Persen	12,177,000,000
4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Kab. Toba	15 Dokumen	537,517,750	Dana Transfer Umum - DAU		100 Persen	92,400,000
J u m l a h					**35,310,359,000**				**44,980,803,650.20**

BALIGE, 2025
Plt. SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TOBA

DONALD SIMANJUNTAK, S.H.
PEMBINA TK. I
NIP. 19701125 200604 1 002

BAB IV

RENCANA KERJA & PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Toba tahun 2026 ini berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Toba Tahun 2026.

Rencana kerja merupakan acuan setiap Perangkat Daerah dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan, sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dan kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan.

Untuk mengetahui secara rinci tentang program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif telah dituangkan dalam bentuk matriks/tabel yang dapat kita lihat pada tabel berikut :

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAB. TOBA
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH						**35.310.359.000,00**							**44.980.803.650,20**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**35.310.359.000,00**							**44.980.803.650,20**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**						**35.310.359.000,00**							**44.980.803.650,20**	
1.	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Penunjang kinerja Perangkat Daerah***	**-**			**100 Persen**	**22.249.835.161,00**						**-**	**27.134.403.650,20**	
		[Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah]	**Nilai Evaluasi Internal AKIP**	**77**	**67.50**	**71.30**	**72.80**	**22.249.835.161,00**	-	-	-	-	-	-	**27.134.403.650,20**	-
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah*	-			100 Persen	45.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	Sekretariat DPRD	-	52.800.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	Sekretariat DPRD		52.800.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		-	-	-	-	-	-	**22.249.835.161,00**	-	-	-	-	-	-	**27.134.403.650,20**	-
	4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	Sekretariat DPRD		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		[Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah]	**Nilai Evaluasi Internal AKIP**	**77**	**67.50**	**71.30**	**72.80**	**22.249.835.161,00**	-	-	-	-	-	-	**27.134.403.650,20**	-
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.320.526.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	ASN	-	3.245.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	3.320.526.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	ASN		3.245.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	15.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	Sekretariat DPRD	-	390.500.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				1 Orang	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	Sekretariat DPRD		390.500.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.895.166.003,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	Sekretariat DPRD	-	3.287.900.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	82.051.062,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	Sekretariat DPRD		148.500.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	183.776.575,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	Sekretariat DPRD		330.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	175.671.430,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	Sekretariat DPRD		434.500.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	98.100.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	Sekretariat DPRD		110.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	1.355.566.936,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	Sekretariat DPRD		2.264.900.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	390.404.399,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	Sekretariat DPRD	-	467.500.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	Sekretariat DPRD		110.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	145.192.340,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	Sekretariat DPRD		137.500.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	225.212.059,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	Sekretariat DPRD		220.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.332.318.944,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	Sekretariat DPRD	-	2.134.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	300.000.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	Sekretariat DPRD		429.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.032.318.944,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	Sekretariat DPRD		1.705.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.009.623.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	Sekretariat DPRD	-	1.633.500.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				16 Unit	865.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	Sekretariat DPRD		880.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				16 Unit	36.000.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	Sekretariat DPRD		82.500.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	65.701.455,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	Sekretariat DPRD		82.500.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	23.693.657,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	Sekretariat DPRD		539.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	19.227.888,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	Sekretariat DPRD		49.500.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-	-			-	12.772.210.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	DPRD	-	14.393.500.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				30 Orang/Bulan	11.955.710.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	DPRD		13.420.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				30 Paket	650.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	DPRD		792.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				30 Orang	166.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	DPRD		181.500.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	-	-			-	1.469.586.815,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	Pimpinan DPRD	-	1.529.703.650,20	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				12 Paket	1.469.586.815,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	Pimpinan DPRD		1.529.703.650,20	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
2.	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	-	-			-	**13.060.523.839,00**						-	**17.846.400.000,00**	
		[Meningkatnya kualitas pelaksaan tugas dan fungsi DPRD]	**Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD**	**100** **90**	**100** **90**	**100** **90**	**100** **90**	**13.060.523.839,00**	-	-	-	-	-	-	**17.846.400.000,00**	-
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	-	-			-	1.023.005.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	Legislatif dan Eksekutif	-	1.160.500.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				2 Dokumen	863.915.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	Legislatif dan Eksekutif		1.034.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				1 Dokumen	159.090.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	Legislatif dan Eksekutif		126.500.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	-	-			-	765.080.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	Legislatif	-	2.640.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				4 Laporan	765.080.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	Legislatif		2.640.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	-	-			-	1.149.820.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	Legislatif	-	918.500.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				12 Dokumen	1.014.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	Legislatif		792.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				1 Orang	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	Legislatif		82.500.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				1 Dokumen	60.120.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	Legislatif		44.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-	-			-	1.049.995.344,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	Legislatif	-	858.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3 Dokumen	1.049.995.344,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	Legislatif		858.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	-	-			-	9.072.622.995,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	Legislatif	-	12.269.400.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				12 Dokumen	8.535.105.245,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	Legislatif		12.177.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				15 Dokumen	537.517.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	Legislatif		92.400.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	J U M L A H							**35.310.359.000,00**							**44.980.803.650,20**	

BAB V
PENUTUP

Rencana kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Toba Tahun 2026 merupakan acuan atau pedoman bagi pelaksana kegiatan dalam pelaksanaannya dan bersifat dinamis sepanjang proses kegiatan tersebut sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Dengan adanya rencana kerja ini diharapkan akan terjadi sinkronisasi sinergis antar unit kerja organisasi, badan, lembaga dalam mendukung dan memfasilitasi penyelenggaraan tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Toba sesuai dengan tuntutan masyarakat. selain itu diharapkan Sekretariat DPRD Kabupaten Toba memberikan dukungan dan fasilitasi yang optimal kepada anggota DPRD Kabupaten Toba sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Demikian diharapkan agar rencana kerja ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab dari Sekretariat DPRD Kabupaten Toba.

BALIGE, 2025

Plt. SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TOBA

DONALD SIMANJUNTAK, S.H.
PEMBINA TK. I
NIP. 19701125 200604 1 002